



Original Article

Kepemimpinan Grassroot dan Kearifan Lokal dalam Implementasi Pilkades Serentak: Membangun Martabat Pemimpin Desa di Era Demokratisasi

Muhammad Muthahari Ramadhani^{1✉}, Nike Purnamawati²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Correspondence Author: muthahhari.ramadhani@ulm.ac.id✉

Abstract:

Penelitian ini mengkaji implementasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banjar tahun 2022 dari perspektif kepemimpinan grassroot dan kearifan lokal. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana nilai-nilai luhur budaya Banjar membentuk kriteria kepemimpinan yang bermartabat di tingkat desa, serta pengaruh pandemi Covid-19 terhadap proses demokratisasi lokal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan etnografi politik dengan melibatkan informan kunci dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat, ulama, dan masyarakat desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan desa yang efektif di Kabupaten Banjar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif, tetapi lebih pada internalisasi nilai-nilai kearifan lokal seperti bahandap, baik hati, dan beradat. Dari 9 desa yang menyelenggarakan Pilkades serentak, mayoritas pemenang merupakan tokoh agama dan ulama yang memiliki kredibilitas moral tinggi di mata masyarakat. Proses seleksi yang melibatkan tim akademisi Universitas Lambung Mangkurat memastikan netralitas, namun keputusan akhir masyarakat tetap didasarkan pada penilaian karakter dan integritas kandidat sesuai nilai-nilai lokal.

Keywords: Kepemimpinan Grassroot, Kearifan Lokal, Pilkades, Martabat Pemimpin, Demokratisasi Desa

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi nyata demokratisasi di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Lebih dari sekadar proses politik, Pilkades sesungguhnya mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan menginternalisasi konsep kepemimpinan yang ideal menurut nilai-nilai budaya setempat. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, fenomena ini menjadi menarik karena proses demokrasi lokal tidak terlepas dari pengaruh kuat tradisi Islam dan budaya Banjar yang telah mengakar selama berabad-abad.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan manifestasi nyata demokratisasi di



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Lebih dari sekadar proses politik, Pilkades sesungguhnya mencerminkan bagaimana masyarakat memahami dan menginternalisasi konsep kepemimpinan yang ideal menurut nilai-nilai budaya setempat. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, fenomena ini menjadi menarik karena proses demokrasi lokal tidak terlepas dari pengaruh kuat tradisi Islam dan budaya Banjar yang telah mengakar selama berabad-abad.

Kepemimpinan grassroot, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh [Northouse \(2019\)](#), merujuk pada kemampuan seseorang untuk memimpin dari akar rumput dengan memahami kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat di tingkat paling dasar. Dalam konteks desa di Kabupaten Banjar, kepemimpinan semacam ini tidak dapat dipisahkan dari kearifan lokal yang mencakup sistem nilai, norma sosial, dan praktik budaya yang telah teruji oleh waktu. [Rahman \(2019\)](#) dalam penelitiannya tentang sejarah pemerintahan desa di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa evolusi kepemimpinan lokal pada abad XX telah mengalami transformasi signifikan namun tetap mempertahankan esensi nilai-nilai tradisional yang mengakar dalam masyarakat Banjar.

Dimensi historis kepemimpinan Banjar memberikan perspektif penting dalam memahami konteks contemporary. [Hamidi \(2020\)](#) menganalisis nilai-nilai kearifan lokal Banjar dalam kepemimpinan politik melalui studi historis tentang pambakal di masa kesultanan, menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan yang bermartabat telah menjadi tradisi yang berkelanjutan dalam masyarakat Banjar. Penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa nilai-nilai seperti bahandap, baik hati, dan beradat bukan sekadar konsep filosofis, melainkan prinsip praktis yang telah diimplementasikan dalam sistem pemerintahan tradisional Banjar selama berabad-abad.

Transformasi menuju demokratisasi desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang kepemimpinan lokal di Indonesia. [Haryanto \(2022\)](#) menjelaskan bahwa transformasi demokrasi lokal dari kepemimpinan adat menuju demokratisasi desa merupakan proses yang kompleks dan memerlukan adaptasi berkelanjutan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, proses ini menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pembangunan desa menjadi aspek krusial yang perlu dipahami secara mendalam. [Rahmawati \(2021\)](#) melalui perspektif sejarah sosial masyarakat Banjar menunjukkan bahwa kearifan lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi modal sosial yang hidup dan relevan dalam konteks pembangunan contemporary. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa nilai-nilai tradisional Banjar memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman sambil tetap mempertahankan esensi kulturalnya.

Implementasi Pilkades serentak di Kabupaten Banjar tahun 2022 menghadapi tantangan unik berupa pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pola interaksi sosial dan kampanye politik. Namun, tantangan ini justru memberikan kesempatan untuk mengamati bagaimana nilai-nilai tradisional beradaptasi dengan kondisi modern, serta sejauh mana masyarakat masih memegang teguh prinsip-prinsip kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kearifan lokal Banjar membentuk konsep kepemimpinan yang bermartabat di tingkat desa, mengkaji proses adaptasi nilai-nilai tradisional dalam implementasi demokrasi modern, serta memahami dinamika sosial-politik yang terjadi selama Pilkades serentak 2022 di Kabupaten Banjar.

Tinjauan Pustaka

A. Kepemimpinan Grassroot dalam Perspektif Sosiologi Politik

Kepemimpinan grassroot merupakan konsep yang berkembang dari pemahaman bahwa kepemimpinan yang efektif harus berakar pada komunitas yang dipimpin. [Burns \(1978\)](#) dalam teori kepemimpinan transformasionalnya menekankan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu mengangkat aspirasi dan moralitas pengikutnya. Dalam konteks desa, hal ini berarti pemimpin harus memahami secara mendalam kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai yang dianut masyarakatnya. [Putnam \(1993\)](#) dalam studinya tentang modal sosial menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan lokal sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Di Indonesia, penelitian [Antlov \(2003\)](#) menunjukkan bahwa kepemimpinan desa yang berhasil adalah yang mampu mengintegrasikan modernitas dengan tradisi, menggabungkan efisiensi administratif dengan legitimasi kultural.

B. Kearifan Lokal sebagai Fondasi Kepemimpinan

Kearifan lokal, menurut [Geertz \(1973\)](#), merupakan sistem pengetahuan dan praktik yang berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai hasil dari interaksi panjang dengan lingkungan fisik dan sosialnya. Dalam konteks kepemimpinan Banjar, kearifan lokal ini termanifestasi dalam beberapa konsep fundamental:

Bahandap (rendah hati): Seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati dan tidak sombong meskipun memiliki kekuasaan. Konsep ini berakar dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya tawadhu'. Baik Hati (berjiwa sosial): Pemimpin yang ideal adalah yang memiliki empati tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

Beradat (beretika): Pemimpin harus menjadi teladan dalam hal akhlak dan perilaku sehari-hari, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya Banjar.

Bijaksana: Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan yang ada.

C. Demokratisasi Desa dalam Era Otonomi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan terhadap hak asal usul dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini membuka ruang bagi implementasi nilai-nilai tradisional dalam praktik demokrasi modern. Penelitian [Vel dan Bedner \(2015\)](#) menunjukkan bahwa demokratisasi di tingkat desa di Indonesia seringkali berbeda dengan model demokrasi liberal, karena dipengaruhi oleh nilai-nilai dan struktur sosial lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi politik. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, yang terdiri dari 19 desa dengan 9 desa menyelenggarakan Pilkades serentak tahun 2022. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan heterogenitas karakteristik desa dan adanya fenomena menarik dalam proses Pilkades.

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi partisipatif selama proses Pilkades dari tahap sosialisasi hingga pelantikan
2. Wawancara mendalam dengan 25 informan kunci meliputi: Bupati dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, Camat dan Kepala Desa yang telah terpilih, Tokoh adat dan ulama setempat, Anggota Panitia Pilkades dan Masyarakat pemilih dari berbagai

kalangan

3. Focus Group Discussion dengan kelompok masyarakat tani dan nelayan
4. Analisis dokumen peraturan daerah dan data statistik pemilihan

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas, dilakukan triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Lapangan

Profil Kepemimpinan Grassroot di Kabupaten Banjar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan di tingkat desa di Kabupaten Banjar memiliki keunikan tersendiri. Dari 9 kepala desa terpilih, 7 orang (77,8%) berlatar belakang tokoh agama atau ulama lokal, 1 orang (11,1%) merupakan tokoh adat, dan 1 orang (11,1%) adalah mantan pegawai negeri yang aktif dalam kegiatan keagamaan.

Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat Banjar masih sangat menghargai kepemimpinan yang memiliki kredibilitas spiritual dan moral. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Abdul Rahim (65 tahun), tokoh adat Desa Aluh-Aluh Kecil:

"Jadi pambakal (kepala desa) tu bukan cuma pandai ngurus administrasi, tapi yang utama adalah bisa jadi panutan. Orang Banjar tu menghargai pemimpin yang alim, bijaksana, dan dekat dengan masyarakat. Kalau cuma pintar bicara tapi tidak ada akhlaknya, masyarakat tidak akan percaya."

Internalisasi Kearifan Lokal dalam Proses Pilkades

Proses Pilkades di Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal terinternalisasi dalam praktik demokrasi. Beberapa temuan penting adalah:

Proses Seleksi Kandidat yang Berbasis Moralitas

Berbeda dengan daerah lain yang lebih menekankan pada aspek teknis-administratif, proses seleksi kandidat kepala desa di Kabupaten Banjar sangat memperhatikan aspek moralitas dan integritas. Tim seleksi yang melibatkan akademisi Universitas Lambung Mangkurat tidak hanya menilai kelengkapan berkas dan kemampuan manajerial, tetapi juga melakukan verifikasi terhadap rekam jejak moral kandidat.

Drs. H. Syahrialludin, Kepala Dinas PMD Kabupaten Banjar, menjelaskan:

"Kami melibatkan tim akademisi untuk memastikan objektivitas penilaian. Namun, kriteria yang digunakan tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas moral. Ini penting karena pemimpin desa harus bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat."

Kampanye yang Santun dan Beretika

Observasi selama periode kampanye menunjukkan bahwa calon kepala desa di Kabupaten Banjar menghindari black campaign dan politik uang. Kampanye lebih banyak dilakukan melalui dialog terbuka di masjid, pengajian, dan pertemuan informal dengan warga. Hal ini mencerminkan internalisasi nilai bahandap dan beradat dalam praktik politik lokal.

Ustadz Muhammad Noor (52 tahun), salah satu calon kepala desa terpilih di Desa Sungai Pinang, menyatakan:

"Saya tidak pernah melakukan kampanye dengan menjanjikan uang atau barang. Yang saya sampaikan adalah visi dan misi untuk memajukan desa berdasarkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Alhamdulillah, masyarakat menerima dengan baik."

Adaptasi Nilai Tradisional dalam Menghadapi Pandemi

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan baru dalam implementasi Pilkades. Namun, masyarakat Banjar menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dengan tetap mempertahankan esensi nilai-nilai tradisional. Beberapa adaptasi yang dilakukan:

Modifikasi Ritual Kampanye

Kampanye yang biasanya dilakukan dalam bentuk pertemuan besar dimodifikasi menjadi diskusi kelompok kecil dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Masjid dan surau menjadi tempat utama dialog antara calon dan masyarakat, yang sejalan dengan tradisi babangungan (musyawarah) dalam budaya Banjar.

Penguatan Peran Tokoh Agama

Pandemi justru memperkuat peran tokoh agama dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Ulama lokal tidak hanya menyampaikan pentingnya partisipasi dalam Pilkades, tetapi juga memberikan pencerahan tentang kriteria pemimpin yang ideal menurut ajaran Islam.

Dinamika Sosial-Politik Selama Pilkades

Minimnya Konflik dan Sengketa

Data menunjukkan bahwa dari 9 desa yang menyelenggarakan Pilkades, hanya 1 desa (Aluh-Aluh Besar) yang mengalami sengketa terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), itupun dapat diselesaikan di tingkat panitia desa. Hal ini menunjukkan tingginya penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkades, yang mencerminkan efektivitas kepemimpinan yang terpilih.

Peran Modal Sosial dalam Legitimasi Kepemimpinan

Analisis menunjukkan bahwa kemenangan kandidat lebih ditentukan oleh modal sosial yang dimiliki daripada modal ekonomi atau politik. Kandidat yang memiliki jaringan sosial luas, terutama melalui kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, cenderung lebih mudah memperoleh dukungan.

Implikasi terhadap Pembangunan Desa

Kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Beberapa indikator yang dapat diamati:

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kepala desa yang memiliki kredibilitas moral tinggi lebih mudah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Gotong royong dan kerja bakti menjadi lebih efektif karena masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap

pemimpinnya.

Pengelolaan Konflik yang Efektif

Pemimpin yang memahami kearifan lokal lebih mampu mengelola konflik sosial dengan pendekatan kultural. Mekanisme babangunan dan badamai (perdamaian) menjadi alat efektif untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan pihak luar.

Pembahasan dan Diskusi Teori

Relevansi Kearifan Lokal dalam Demokrasi Modern

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tidak hanya relevan, tetapi sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di tingkat grassroot. Nilai-nilai seperti bahandap, baik hati, dan beradat memberikan foundation moral yang kuat bagi praktik kepemimpinan demokratis. Hal ini sejalan dengan [argumentasi Sen \(1999\)](#) bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur, tetapi lebih pada substansi yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks Kabupaten Banjar, nilai-nilai universal tersebut diartikulasikan melalui kearifan lokal yang telah mengakar dalam masyarakat.

Perspektif sejarah memberikan pemahaman mendalam tentang kontinuitas dan perubahan sistem kepemimpinan dalam konteks otonomi desa. [Supriadi \(2020\)](#) menganalisis bahwa kontinuitas sistem kepemimpinan adat dalam konteks otonomi desa di Indonesia menunjukkan adaptabilitas yang luar biasa dari nilai-nilai tradisional. Dalam kasus Kabupaten Banjar, penelitian ini mengkonfirmasi temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa meskipun format kelembagaan berubah sesuai dengan tuntutan demokratisasi, esensi nilai-nilai kepemimpinan tradisional tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat.

Dimensi komparatif memberikan perspektif yang lebih luas tentang fenomena kepemimpinan religius dalam pemerintahan desa. [Wahyudi \(2022\)](#) dalam studinya tentang dinamika kepemimpinan religius di Jawa dan Kalimantan menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan cultural context, nilai-nilai religius memainkan peran sentral dalam legitimasi kepemimpinan lokal. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar, kredibilitas spiritual menjadi faktor determinan dalam penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal.

Integrasi antara kepemimpinan tradisional dan modernisasi pemerintahan desa menunjukkan kompleksitas yang memerlukan pendekatan holistik. [Budiman \(2021\)](#) mengkaji kepemimpinan tradisional dan modernisasi pemerintahan desa di Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa proses modernisasi tidak harus mengorbankan nilai-nilai tradisional. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa kepemimpinan yang mengintegrasikan kredibilitas spiritual dengan kapasitas manajerial modern mampu mencapai legitimasi yang tinggi dan efektivitas yang optimal.

Konteks transformasi sosial yang lebih luas menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Kabupaten Banjar bukan anomali, melainkan bagian dari trend yang lebih general dalam demokratisasi Indonesia. [Haryanto \(2022\)](#) menjelaskan bahwa transformasi demokrasi lokal dari kepemimpinan adat menuju demokratisasi desa merupakan proses yang universal namun dengan manifestasi yang unik di setiap daerah. Dalam konteks Banjar, keunikan tersebut terletak pada kemampuan masyarakat untuk

mempertahankan nilai-nilai Islam dan budaya lokal sebagai filter dalam proses demokratisasi.

Tantangan dan Peluang Kepemimpinan Grassroot

Meskipun menunjukkan hasil positif, kepemimpinan grassroot berbasis kearifan lokal juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu dianalisis secara komprehensif. Perspektif historis menunjukkan bahwa tantangan modernisasi bukanlah fenomena baru dalam sejarah kepemimpinan lokal di Kalimantan Selatan. [Rahman \(2019\)](#) dalam kajiannya tentang evolusi kepemimpinan lokal pada abad XX menunjukkan bahwa masyarakat Banjar telah berulang kali menghadapi tantangan perubahan zaman dan selalu berhasil menemukan formula adaptasi yang tepat tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Tantangan Modernisasi

Globalisasi dan modernisasi dapat mengikis nilai-nilai tradisional, terutama di kalangan generasi muda. Diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga kontinuitas nilai-nilai luhur sambil tetap terbuka terhadap perubahan positif. [Rahmawati \(2021\)](#) mengingatkan bahwa kearifan lokal sebagai modal sosial memerlukan regenerasi yang berkelanjutan untuk tetap relevan dalam konteks pembangunan contemporary. Penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda di Kabupaten Banjar masih menghargai kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai tradisional, namun mereka juga mengharapkan modernisasi dalam aspek teknis dan manajerial.

Tantangan Kapasitas Teknis

Kepemimpinan yang kuat secara moral harus diimbangi dengan kapasitas teknis dalam mengelola pemerintahan modern. Hal ini memerlukan program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. [Budiman \(2021\)](#) menekankan bahwa kepemimpinan tradisional harus mengalami modernisasi dalam aspek manajerial tanpa kehilangan esensi nilai-nilai tradisionalnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa terpilih di Kabupaten Banjar mengakui pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan bersedia mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinannya.

Peluang Revitalisasi Nilai-Nilai Luhur

Di sisi lain, era demokratisasi memberikan peluang besar untuk revitalisasi nilai-nilai luhur yang selama ini mungkin terpinggirkan. [Supriadi \(2020\)](#) menunjukkan bahwa otonomi desa memberikan ruang yang luas bagi implementasi nilai-nilai adat dalam praktik pemerintahan. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Pilkades serentak di Kabupaten Banjar telah berhasil menjadi medium untuk revitalisasi nilai-nilai kepemimpinan tradisional yang hampir terlupakan, terutama konsep pambakal yang bermartabat dan berintegritas tinggi.

Potensi Replikasi Model

Keberhasilan model kepemimpinan grassroot berbasis kearifan lokal di Kabupaten Banjar berpotensi untuk direplikasi di daerah lain dengan adaptasi sesuai konteks lokal. [Wahyudi \(2022\)](#) dalam studi komparatifnya menunjukkan bahwa

meskipun setiap daerah memiliki keunikan cultural, prinsip-prinsip dasar kepemimpinan religius memiliki universalitas yang memungkinkan adaptasi lintas wilayah. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan model kepemimpinan grassroot yang lebih general namun tetap sensitive terhadap konteks lokal.

Model Kepemimpinan Ideal untuk Desa

Berdasarkan temuan penelitian dan sintesis dengan berbagai kajian terdahulu, model kepemimpinan ideal untuk desa di Kabupaten Banjar adalah yang mengintegrasikan empat dimensi utama. Pertama, kredibilitas spiritual yang mencakup pemahaman agama yang baik dan keteladanan dalam praktik keagamaan. [Hamidi \(2020\)](#) menunjukkan bahwa dalam tradisi kepemimpinan Banjar, kredibilitas spiritual bukan hanya atribut personal tetapi requirement fundamental yang menentukan legitimasi kepemimpinan.

Kedua, kapasitas manajerial yang mencakup kemampuan teknis dalam mengelola administrasi dan program pembangunan. [Budiman \(2021\)](#) menekankan bahwa modernisasi pemerintahan desa memerlukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dengan kapasitas teknis modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar mengharapkan pemimpinnya tidak hanya memiliki kredibilitas moral tetapi juga kemampuan untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien.

Ketiga, kedekatan sosial yang mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. [Rahmawati \(2021\)](#) menunjukkan bahwa modal sosial dalam masyarakat Banjar dibangun melalui interaksi yang intensif dan berkelanjutan antaranggota komunitas. Kepemimpinan yang efektif harus mampu mempertahankan dan memperkuat modal sosial ini melalui pendekatan yang inclusive dan participatory.

Keempat, integritas moral yang mencakup konsistensi antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. [Supriadi \(2020\)](#) menjelaskan bahwa dalam sistem kepemimpinan adat, integritas moral bukan hanya expectation tetapi absolute requirement yang menentukan sustainability kepemimpinan. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa di era demokratisasi, integritas moral tetap menjadi faktor krusial dalam menentukan acceptability dan effectiveness kepemimpinan lokal.

Kesimpulan

Implementasi Pilkades serentak di Kabupaten Banjar tahun 2022 menunjukkan bahwa kepemimpinan grassroot yang berakar pada kearifan lokal masih sangat relevan dan efektif dalam konteks demokrasi modern. Nilai-nilai seperti bahandap, baik hati, dan beradat memberikan foundation yang kuat bagi terciptanya kepemimpinan yang bermartabat dan legitimat di mata masyarakat. Adaptasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19 menunjukkan fleksibilitas dan resiliensi nilai-nilai tradisional dalam menghadapi tantangan modern. Masyarakat Banjar berhasil mempertahankan esensi kearifan lokal sambil menyesuaikan dengan kondisi kontemporer. Minimnya konflik dan tingginya penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkades mengindikasikan bahwa kepemimpinan yang berakar pada kearifan lokal memiliki legitimasi yang kuat. Hal ini memberikan foundation yang solid bagi pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan :

Untuk Pemerintah Daerah

1. Mengembangkan modul pelatihan kepemimpinan desa yang mengintegrasikan kearifan lokal dengan kapasitas teknis modern
2. Memperkuat peran tokoh adat dan ulama dalam proses sosialisasi dan edukasi politik
3. Mengembangkan indikator kinerja kepala desa yang mencakup aspek moral dan spiritual

Untuk Akademisi

1. Melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam jangka panjang
2. Mengembangkan model kepemimpinan grassroot yang dapat diadaptasi di daerah lain
3. Melakukan dokumentasi dan preservasi nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan kepemimpinan

Untuk Masyarakat

1. Melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai kearifan lokal in daily life
2. Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi lokal dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur
3. Memberikan dukungan konstruktif kepada pemimpin terpilih untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika kepemimpinan lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks demokratisasi desa. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan model kepemimpinan yang lebih efektif dan legitimat di tingkat grassroot

References

- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Budiman, A. (2021). Kepemimpinan Tradisional dan Modernisasi Pemerintahan Desa di Kalimantan Selatan. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 4(2), 127-138.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hamidi, M. (2020). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Banjar dalam Kepemimpinan Politik: Studi Historis Pambakal di Masa Kesultanan. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 3(1), 45-62.
- Haryanto, S. (2022). Transformasi Demokrasi Lokal: Dari Kepemimpinan Adat Menuju Demokratisasi Desa di Indonesia. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 5(1), 78-95.
- Imran, M. F. (2024). Criminological Examination of Physical and Psychological Violence Committed Against Children in the School Environment. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 41-47.

- Jamaluddin; Muthahari, Muhammad; Syahrin, M. Najeri Al. (2023). Implementation of the Simultaneous Village Head Election (PILKADES) Policy in Banjar Regency, Indonesia. *Technium Soc. Sci. J.*, 52, 244.
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rahman, A. (2019). Sejarah Pemerintahan Desa dan Evolusi Kepemimpinan Lokal di Kalimantan Selatan Abad XX. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 2(2), 112-128.
- Rahmawati, D. (2021). Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Pembangunan Desa: Perspektif Sejarah Sosial Masyarakat Banjar. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 4(1), 89-104.
- Ramadhani, M. M., & Al Syahrin, M. N. (2023). Komunikasi Dakwah Pada Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Lingkup Pondok Pesantren Dalam Perspektif Religius. *Kaganga komunika: Journal of Communication Science*, 5(1), 80-89.
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of related party transaction and tax haven utilization on tax avoidance moderated by Country-by-Country reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26-40.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Supriadi, H. (2020). Kontinuitas dan Perubahan Sistem Kepemimpinan Adat dalam Konteks Otonomi Desa di Indonesia. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 3(2), 156-171.
- Setiawati, I., Wardani, S., & Lestari, W. (2024). Development of Wordwall-based Indonesian Geographical Condition Assessment Instrument in Modipaskogo E-Book for Elementary School Students. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 48-65.
- Vel, J., & Bedner, A. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Wahyudi, T. (2022). Dinamika Kepemimpinan Religius dalam Pemerintahan Desa: Studi Komparatif Jawa dan Kalimantan. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 5(2), 203-220.